

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena meneruskan kekuasaan pada anggota keluarga yang dikenal dengan istilah dinasti politik bukanlah sebagai suatu hal yang baru terjadi di aras lokal. Fenomena tersebut sudah ada sejak abad kerajaan yang dilatarbelakangi dengan mengakarnya sejarah feodalisme dan tradisi kerajaan yang enggan untuk melepaskan kekuasaan yang telah dimiliki oleh nenek moyang sebagai penguasa kerajaan, sehingga menjadi pemantik bagi anggota keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya.¹ Hal ini yang kemudian menjadi awal terbentuknya dinasti politik dalam pemerintahan Indonesia, di mana sifat feodalisme telah mengakar pada diri penguasa sehingga anggota keluarga dijadikan basis yang paling tepat untuk mempertahankan dan meneruskan kekuasaan.

Pada masa Orde Baru, keluarga cendana merupakan bentuk dinasti politik yang berhasil dalam mempertahankan kekuasaannya kepada anggota keluarga selama 32 tahun berkuasa.² Keberhasilan tersebut diperoleh dengan kekuasaan elit yang dibatasi oleh pusat dan hanya melakukan pengangkatan maupun penunjukan secara langsung. Hal ini dilakukan oleh penguasa agar dapat leluasa menempatkan anggota keluarganya pada jabatan strategis di pemerintahan. Di tingkat lokal proses

¹ Zaldi Rusnaedy. 2020. *Dinasti Politik di Aras Lokal*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 29.

² Keluarga Cendana dikenal sebagai keluarga dari Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia, sehingga semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya (Winda Roselina Effendi. 2018. *Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*. *Jurnal Trias Politika*. 2 (2): 233-247).

tersebut juga berlaku dengan elit lokal yang terbagi menjadi dua tipe, yakni elit lokal yang berpihak pada kekuasaan Orde Baru dan mendapatkan keistimewaan politik dan elit lokal yang bertolak belakang dengan tidak mematuhi peraturan sehingga tidak mendapatkan jabatan politik di daerahnya.³ Kondisi ini yang kemudian menyuburkan dan memperluas dinasti politik di masa pemerintahan Orde Baru dengan pos-pos kunci pemerintahan yang telah dipolitisasi oleh penguasa dan diisi anggota keluarga dan elit politik yang berpihak pada kekuasaannya.

Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya masa Reformasi telah membuat perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia dengan mewujudkan demokrasi dan menghilangkan dominasi pada kekuasaan pusat. Namun, pada realita yang ada lahirnya demokrasi tidak mampu menghilangkan dominasi kekuasaan di pusat, melainkan menghadirkan kembali kekuasaan elit politik di aras lokal dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi.⁴ Berdasarkan dari yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dinasti politik di aras lokal bukanlah sebagai suatu hal yang baru, melainkan dampak dari mengakarnya sejarah dan tradisi lama yang digunakan kembali di era demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan elit politik lokal. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perkembangan dinasti politik di aras lokal merupakan sebuah kemandegan di era demokrasi, di mana dengan hadirnya dinasti politik mengindikasikan dampak negatif dari pengimplementasian asas desentralisasi dan otonomi daerah.

³ Wasisto Raharjo Djati. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 18 (2) : 203-231.

⁴ Leo Agustino. 2010. Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten. *Jurnal Prisma*. Vol. 29 (3) : 102-116.

Rusnaedy di dalam bukunya yang berjudul *Dinasti Politik di Aras Lokal* mengungkapkan hal yang serupa bahwa pada awal terwujudnya desentralisasi masyarakat mengharapkan hal tersebut dapat memberikan kontribusi di daerah, namun belakangan memperlihatkan ambivalensi dari makna desentralisasi itu sendiri.⁵ Hal ini terlihat dari hadirnya desentralisasi menjadi angin segar bagi orang kuat lokal (*local strongman*) untuk membangun kekuasaannya dengan terjun ke dalam dunia politik dan melibatkan anggota keluarga lainnya.⁶ Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Migdal bahwa *local strongman* bekerjasama dengan birokrat dan politisi di tingkat lokal dalam memutuskan kebijakan.⁷ Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa peran *local strongmen* dalam membangun jaringan untuk membentuk kekuasaan keluarganya dalam dinasti politik sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan juga politik, di mana hal ini digunakan untuk memonopoli kekuasaan ataupun kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, selain kemunculan *local strongman* yang menjadi salah satu pemicu masifnya perkembangan dinasti politik, Djati di dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang dianalisis menjadi dasar terbentuknya suatu dinasti politik. Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat

⁵ Ambivalensi adalah dua hal atau perasaan yang bertentangan, di mana dalam dinasti politik dan lahirnya desentralisasi yang menjadikan satu sisi memberikan hak politik untuk dipilih dan memilih dan sisi lain merampas hak untuk dipilih dan memilih (Zaldi Rusnaedy. *Op. cit.* Hlm. 28-29).

⁶ *Ibid.*

⁷ Joel Migdal. 1988. *Strong Societies and Weak States: State Society Relations and State Capabilities in The third World*. New Jersey: Priceton University Press.

publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.⁸ Dari yang telah diungkapkan oleh Djati, dapat dijelaskan bahwa kehadiran dan masifnya dominasi dinasti politik telah merusak sistem demokrasi yang terjadi di partai politik dan juga masyarakat. Dalam hal ini, proses kaderisasi dalam partai politik telah dimanipulasi untuk kepentingan kelompok penguasa, dan pemahaman tentang politik yang belum didapatkan masyarakat dengan layak, sehingga menjadikan dinasti politik sebagai suatu hal yang lumrah terjadi.

Kehadiran dinasti politik di aras lokal sebelumnya telah ditangkal dengan hadirnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2015 yang berisi larangan terhadap keluarga petahana untuk maju sebagai calon kecuali telah lewat jeda satu periode masa jabatan.⁹ Namun, undang-undang tersebut menghadirkan pihak yang pro dan kontra. Pihak pro menganggap bahwa undang-undang tersebut adalah cara yang tepat untuk mencegah tumbuh suburnya dinasti politik pada setiap kontestasi Pilkada. Di sisi lain, pihak kontra tidak setuju dengan hadirnya undang-undang tersebut, di mana menurut mereka hal tersebut telah bertolak belakang dengan hak asasi manusia atas kebebasan untuk dipilih dan memilih. Selain itu, pihak kontra juga menyampaikan bahwa permasalahan pada dinasti politik berada di penjurangan atau kandidasi yang dilakukan oleh partai

⁸ Wasisto Raharjo Djati. *Loc. cit.*

⁹ Fitriyah. 2020. Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Politika*. 11 (1): 1-17.

politik. Sebab, partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik untuk menghasilkan kader terbaik yang ditujukan untuk menduduki kursi pada jabatan publik.

Berakhirnya problematik tersebut ialah penolakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang Pilkada melalui proses judicial review. Dalam pernyataannya, MK menjelaskan bahwa undang-undang Pilkada telah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) atas kebebasan untuk dipilih dan memilih. Selain itu, MK juga menganggap bahwa alasan konflik kepentingan dengan petahana hanya merupakan pertimbangan yang bersifat politis dan asertif.¹⁰ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa MK setuju dengan kehadiran dinasti politik dan memberikan legitimasi bahwa hubungan sebab-akibat dari tumbuh suburnya dinasti politik bukanlah sebagai hal penting yang harus dikaji.

Penolakan MK terhadap undang-undang Pilkada telah bertolak belakang dengan yang telah dijelaskan oleh Djati sebelumnya, di mana terdapat dua hal yang menjadikan dinasti politik dapat terbentuk, yakni salah satunya proses rekrutmen politik yang macet sehingga terjadi pragmatisme yang dilakukan oleh partai politik dengan mendorong dari kalangan keluarga untuk menggantikan petahana.¹¹ Hal ini dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan kedudukannya agar dapat terlibat dalam setiap proses kegiatan pemerintah, di mana dengan mencalonkan kader yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa akan lebih mudah untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, hal ini juga dimanfaatkan oleh partai politik untuk dapat mendulang elektabilitas partainya.

¹⁰ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri. 2022. Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan antara Hak Asasi Manusia. *Jurnal APHTN-HAN*. Vol. 1 (1): 105-119.

¹¹ Wasisto Raharjo Djati. *Loc. cit.*

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan, penolakan terhadap undang-undang Pilkada yang dilakukan oleh MK sama dengan memberikan tempat untuk dinasti politik dapat berkembang dan menyuburkan kekuasaannya. Hal ini juga yang dapat membuat praktek korupsi semakin marak terjadi di dalam lingkungan keluarga dinasti, di mana kekuasaan yang terpusat akan lebih mudah dimonopoli oleh keluarga penguasa yang tujuannya untuk memperkaya anggota keluarganya. Selain itu, kasus korupsi di dalam dinasti politik juga lebih sulit diungkap karena satu sama lain anggota keluarga akan saling menutupi keterlibatannya.¹² Kemudian, hal inilah yang dapat berimplikasi terhadap kematangan demokrasi lokal, di mana fondasi utama demokrasi lokal adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan politik. Asrinaldi di dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Lokal di Indonesia: Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat* juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa nilai dasar dari pelaksanaan demokrasi lokal adalah adanya keterlibatan masyarakat secara langsung, terutama dalam membuat keputusan.¹³ Oleh karena itu, dengan maraknya dinasti politik dan kasus korupsi di dalam keluarga dinasti mengindikasikan demokrasi belum berjalan secara maksimal dengan minimnya keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat yang minim juga didukung dengan semakin berkembangnya dinasti politik yang diklasifikasikan ke dalam dua cara, yakni *by design* dan *by accident*.¹⁴ Salah satunya ialah dinasti politik Atut di Banten yang

¹² *Ibid.*

¹³ Asrinaldi. 2017. *Demokrasi Lokal di Indonesia : Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Padang: Penerbit Erka. Hlm. 49-50.

¹⁴ Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama dengan jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Contoh

berkembang dengan cara *by design*, di mana setiap anggota keluarga yang akan berpartisipasi dalam politik sudah didesain untuk merekayasa keberhasilan meraih tujuannya, meskipun aktor utama di dalam keluarga Atut telah menjadi tersangka kasus korupsi.¹⁵ Oleh karena itu, meskipun Atut dan adiknya menjadi tersangka kasus korupsi, akan tetapi dinasti politik Atut tetap tumbuh subur dengan strategi yang telah diatur sedemikian rupa untuk dapat meraih kemenangan dalam setiap kontestasi pemilihan, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini juga didukung dengan minimnya partisipasi masyarakat Banten yang selalu berada di bawah 65 persen dalam setiap Pilkada.¹⁶ Dengan minimnya partisipasi masyarakat tersebut, maka mengindikasikan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai politik.

Tumbuh suburnya dinasti politik Atut di Banten yang mendominasi meskipun Atut dan adiknya telah menjadi tersangka kasus korupsi menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Keluarga Atut tidak hanya memenangkan Pilkada, namun juga berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan kembali menang sebagai petahana. Selain itu, dominasi yang dimiliki keluarga Atut pada organisasi masyarakat dan partai politik juga ikut mendukung dalam mempertahankan kekuasaan tersebut. Hal lainnya, keterlibatan masyarakat di Banten yang minim, di mana fondasi utama dalam membangun demokrasi lokal adalah adanya peran dan

dinasti politik *by design* adalah dinasti politik Atut di Banten. Adapun, dinasti politik *by accident* terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik (Djati. *Op. cit.*, Hlm. 215-216).

¹⁵ Wasisto Raharjo Djati. *Loc. cit.*

¹⁶ Mhd. Al Fahjri Sukri. *Loc. cit.*

partisipasi masyarakat, sehingga hal ini yang kemudian melanggengkan kekuasaan dinasti politik Atut di Banten.

Penelitian mengenai dinasti politik Atut di Banten sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yakni pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Al Fahjri Sukri pada Tahun 2020 dengan judul “Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat” yang memfokuskan pada isu pembahasan mengenai strategi politik Atut dalam mempertahankan kekuasaannya dan rendahnya partisipasi masyarakat di Banten.¹⁷ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna pada Tahun 2017 dengan judul “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah” yang mengkaji mengenai gejala persebaran (proliferasi, pertumbuhan) dinasti politik Atut di banyak arena kehidupan masyarakat,¹⁸ dan ketiga penelitian yang dilakukan oleh Handoyo pada Tahun 2018 dengan judul “Politik Dinasti dan Krisis Lingkungan: Praktik Kekuasaan di Provinsi Banten, Indonesia”.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan dampak dari dinasti politik terhadap Sumber Daya Alam (SDA), sehingga memunculkan beberapa masalah yang merugikan lingkungan.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, maka penelitian ini menjelaskan tentang dinasti politik Atut dalam menjaga dan mempertahankan kekuasaannya serta implikasi terhadap kematangan demokrasi di Banten yang diakibatkan dari masifnya dominasi dinasti politik Atut. Selain itu, penelitian ini hampir serupa

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agus Sutisna. 2017. Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Jurnal Politik Indonesia : Indonesian Political Science Review*. 2 (2): 100-120.

¹⁹ Handoyo. 2018. Politik Dinasti dan Krisis Lingkungan: Praktik Kekuasaan di Provinsi Banten, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 15 (2): 107-128.

dengan penelitian Handoyo yang melihat dampak dari dinasti politik, di mana Handoyo mengkaji dampak dinasti politik terhadap SDA, sedangkan penelitian ini memfokuskan dampak pada kematangan demokrasi di Banten dari tumbuh suburnya dinasti politik Atut.

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi lokal menurut Timothy D. Sisk, di mana teori demokrasi lokal mencakup empat hal. Pertama, partisipasi masyarakat, kedua, proses musyawarah, ketiga, pendidikan politik, dan keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial.²⁰ Adapun fokus penelitian ini untuk menjelaskan fenomena dinasti politik Atut di Banten dengan masih tumbuh suburnya dinasti politik Atut meskipun Atut dan adiknya telah menjadi tersangka kasus korupsi dan implikasinya terhadap kematangan demokrasi di Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Pada fenomena dinasti politik di Indonesia, Banten menjadi salah satu contoh paling berhasil dalam melanggengkan kekuasaannya di aras lokal. Keberhasilan Banten sebagai salah satu dinasti politik terkuat tidak lepas dari peran dominasi dan pengaruh Tubagus Chasan Sohib.²¹ Chasan Sohib merupakan salah satu aktor yang berperan penting pada historis pemisahan Banten menjadi provinsi sendiri yang awalnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Chasan Sohib juga dikenal sebagai pengusaha di Banten dan salah satu perusahaan yang dimilikinya ialah P.T. Sinar Ciomas yang bergerak khususnya dalam bidang

²⁰ Timothy D. Sisk, dkk. 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: Aameepro. Hlm. 14-15.

²¹ Leo Agustino. *Loc. cit.*

konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya.²² Melalui perusahaan yang dimilikinya tersebut, Chasan Sohib berjasa dalam membangun sarana dan prasarana di Banten.

Ketokohan yang ada di dalam diri Chasan Sohib kerap membuat masyarakat menggugatnya, sebab masyarakat menuduh bahwa Chasan Sohib terlalu jauh mengintervensi kebijakan pada pemerintah daerah. Selain itu, seorang staf Provinsi Banten juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh urusan proyek di Banten telah dikuasai oleh Chasan Sohib.²³ Chasan Sohib sebagai manifestasi *local strongman* atau di Banten dikenal dengan sebutan Jawara, di mana membuat Chasan Sohib memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan pemimpin maupun pemerintah lokal lainnya. Sidel menyampaikan hal yang serupa bahwa lembaga-lembaga seperti parlemen, partai politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) dikuasai oleh orang kuat lokal yang telah menjadi bos lokal.²⁴ Chasan Sohib telah berhasil menjadi bos lokal dengan menguasai partai politik, jabatan eksekutif, dan legislatif yang diduduki oleh keluarga besarnya, meskipun ia tidak menjabat sebagai gubernur, walikota ataupun anggota legislatif, namun Chasan Sohib mampu menjadi bos lokal dengan membangun dinasti politik di Banten yang diisi oleh anggota keluarganya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuasaan Chasan Sohib sebagai *local strongmen* menjadi dasar terbentuknya dinasti politik di Banten, di mana tumbuh subur nya dinasti politik dapat dikatakan sebagai wujud kegagalan dalam menerapkan demokrasi lokal di Banten.

²² Mhd. Al Fahjri Sukri. *Loc. cit.*

²³ Syarif Hidayat dalam Henk Schulte Nordholt, Gerry van Klinken dan Ireen Karang-Hoogenboom. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Obor dan KITLV-Jakarta. Hlm. 268.

²⁴ John T Sidel. 1999. *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*. Stanford: Stanford University.

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan, kekuasaan Chasan Sohib tidak hanya seputar pada proyek pembangunan dan gelar Jawara yang melekat pada dirinya, melainkan juga merambat ke dunia perpolitikan. Melalui Partai Golkar, Chasan Sohib mulai melebarkan jaringannya dengan menandingkan anaknya, Ratut Atut Chosiyah sebagai wakil gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2001-2006. Pada pemilihan tersebut, Atut bersanding dengan Djoko Munandar sebagai Gubernur Banten yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Pada masa itu, Atut merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan publik pada tingkat daerah. Kemenangan Atut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten merupakan awal dari berdirinya dinasti politik Atut. Sebab setelah itu, Atut memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada dua periode berikutnya, yakni pada Tahun 2006-2011 dan 2011-2014.²⁵ Kemenangan tersebut juga berpengaruh pada keluarga Atut yang ikut memenangkan pemilihan di legislatif maupun eksekutif.

Pada Tahun 2013, terjadi pergolakan pada dinasti politik Atut, di mana menjadikan Atut dan adiknya, Tubagus Chairil Wardana (Wawan) sebagai tersangka kasus korupsi yang juga melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. KPK menangkap Atut dan Wawan bersama dengan Akil Mokhtar atas kasus korupsi tentang perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan korupsi pengadaan sarana-prasarana alat-alat kesehatan dan pengadaan barang lainnya di Provinsi Banten dari Tahun 2011 sampai 2013.²⁶ Dari penangkapan

²⁵ Mhd. Al Fahjri Sukri. *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

tersebut, banyak sejumlah pengamat politik yang mendeklarasikan bahwa dinasti politik Atut akan mengalami kehancuran, di mana sang aktor utama dari dinasti politik Banten sudah tidak dapat melebarkan sayapnya ataupun berkuasa lagi.

Pernyataan dari pengamat politik tentang kehancuran dinasti politik Atut seakan semakin didukung dengan terungkapnya kembali tindakan kasus korupsi yang melibatkan beberapa adik tiri Atut dan kerabatnya. Tertangkapnya adik Atut menandakan keburukan dari dinasti politik dengan maraknya kasus korupsi. Berikut penjelasan kasus tindakan korupsi yang dilakukan keluarga besar Ratu Atut dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 Kasus Tindakan Korupsi yang dilakukan Keluarga Besar Ratu Atut

Nama dan Hubungan Keluarga	Tindakan Kasus Korupsi yang dilakukan	Kurungan Waktu Penjara
Ratu Atut Chosiyah (dinasti Atut)	Kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemerintah Provinsi Banten.	4 Tahun
Tubagus Chairil Wardana (adik kandung Atut)	Kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemerintah Provinsi Banten.	7 Tahun
Ratu Lilis Karyawati Hasan (adik tiri Atut)	Korupsi dalam proyek sodetan sungai Cibuangeun, Kabupaten Lebak.	8,5 Tahun
Tubagus Haerul Jaman (adik tiri Atut)	Saksi atas kasus korupsi yang dilakukan oleh Atut dan Wawan.	-
Jhon Chaidir (adik ipar Atut)	Kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja.	-

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada Tabel 1.1 yang telah dijelaskan oleh peneliti mengenai kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh keluarga besar Atut dan membuat keyakinan beberapa pengamat politik akan jatuhnya dinasti politik Atut. Namun, pada kenyataan yang ada pernyataan dari para pengamat politik tersebut tidak terbukti kebenarannya. Sebab, keluarga Atut masih dapat melebarkan sayap kekuasaannya pada Pilkada serentak 2015 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di Banten.²⁷ Berikut peneliti jelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Kemenangan Keluarga Atut pada Pilkada Serentak 2015 dan Pilgub 2017

Nama dan Hubungan Keluarga	Jabatan dan Periode	Partai Politik
Andika Hazrumi (anak pertama)	Wakil Gubernur Banten (2017-2022)	Golkar
Ratu Tatu Chasanah (adik)	Bupati Serang (2016-2020)	Golkar
Tanto W Arban (menantu)	Wakil Bupati Pandeglang (2016-2020)	Golkar
Airin Rahmi Diany (ipar/istri dari Wawan)	Wali Kota Tangerang Selatan (2016-2020)	Golkar

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa tertangkapnya Atut dan adiknya, Wawan tidak mempengaruhi citra dan eksistensi keluarga Atut pada perhelatan Pilkada dan Pilgub yang dilaksanakan. Hal ini juga menjadi pertanyaan oleh beberapa penelitian sebelumnya tentang kemenangan keluarga Atut yang masih dapat berjaya setelah tertangkapnya Atut. Dengan masih menguatnya dominasi kemenangan pada keluarga Atut pada Pilkada serentak 2015 dan Pilgub 2017.

²⁷ *Ibid.*

Selanjutnya, kemenangan klan Ratu Atut masih menyelimuti pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Kemenangan tersebut juga dirasakan oleh sebagian pihak, terutama oleh pengamat politik yang lebih dahulu telah memperkirakan jatuhnya dinasti Atut setelah sang aktor tertangkap kasus korupsi. Untuk lebih jelas melihat kemenangan dinasti politik Atut pada Pileg 2019 lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Kemenangan Keluarga Atut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019

Nama dan Hubungan Keluarga	Jabatan dan Periode	Partai Politik
Andiara Aprilia Hikmat (anak)	Anggota DPD RI (2019-2024)	Golkar
Tubagus Khaerul Jaman (adik)	Anggota DPR RI (2019-2024)	Golkar
Ratu Ria Maryana (adik)	Wakil Ketua I DPRD Kota Serang (2019-2024)	Golkar
Ade Rossi Chaerunnisa (menantu)	Anggota DPR RI (2019-2024)	Golkar

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Kemenangan keluarga Atut tidak berhenti hanya pada Pileg 2019, namun juga berlanjut pada Pilkada 2020. Dalam Pilkada 2020 juga menampilkan kemenangan ibu dan anak, di mana Ratu Tatu Chasanah yang merupakan adik kandung Atut dan Pilar Saga Ichsan anak dari Ratu Tatu yang merupakan keponakan Atut. Berikut peneliti jelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kemenangan Keluarga Atut pada Pilkada Serentak 2020

Nama dan Hubungan Keluarga	Jabatan Periode	Partai Politik
Ratu Tatu Chasanah (adik)	Bupati Serang (petahana) (2016 -sekarang)	Golkar
Tanto W. Arban	Wakil Bupati Pandeglang (petahana) (2016 - sekarang)	Golkar
Pilar Saga Ichsan	Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (2021 - sekarang)	Golkar

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada Tabel 1.3 dan 1.4 kemenangan keluarga Atut bagaikan angin segar pada perkembangan dinasti politik di Indonesia. Sebab, dominasi keluarga Atut seperti tidak memiliki celah sedikitpun, di mana membuat keluarga Atut dapat berkuasa secara leluasa di daerahnya. Dengan masih mendominasi kemenangan keluarga Atut dalam perpolitikan di Banten, maka pada Tahun 2020 dilakukan penelitian yang memfokuskan pada dinasti Atut yang masih tumbuh subur, meskipun sang aktor telah tertangkap.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Mhd. Al Fahjri Sukri pada Tahun 2020. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa keberhasilan keluarga Atut dalam mempertahankan dinasti politik di Banten tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarga Atut. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dinasti politik Atut di Banten berbentuk *Octopussy Dynasty*, di mana Atut dan keluarganya memanfaatkan jaringan kuasa yang telah di bangun oleh Tubagus Chasan Sohib, ayah Atut.²⁸ Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutisna pada Tahun 2017 menungkapkan bahwa jejaring kekuasaan Atut tidak hanya meliputi pada tingkat eksekutif, legislatif, dan partai politik, melainkan juga menyebar pada arena kehidupan masyarakat, seperti bisnis, sosial-budaya, pendidikan dan keormasan.²⁹ Berikut peneliti jelaskan dalam Tabel 1.5 mengenai dominasi keluarga Atut pada arena kehidupan masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Sutisna. *Loc. cit.*

Tabel 1.5 Dominasi Keluarga Atut pada Arena Kehidupan Masyarakat

Nama dan Hubungan Keluarga	Organisasi/Asosiasi	Posisi Jabatan
Tubagus Chasan Sochib (ayah)	Relawan Banten Bersatu (RBB), Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia, Satuan Kerja Ulama dan Satuan Kerja Pendekar	Pendiri
Tubagus Chaeri Wardana (adik)	Kadin Banten dan Pengprov Taekwondo Banten	Ketua
Tubagus Khaerul Jaman (adik)	IMI Banten	Ketua
Ratu Tatu Chasanah (adik)	PMI Banten, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia Banten, GWKS, Dekopinda, Forum Paguyuban Banten Bersatu dan Koalisi Politisi Perempuan Indonesia Banten (rata kiri)	Ketua
Andika Hazrumy (anak)	Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia, Satuan Kerja Ulama dan Satuan Kerja Pendekar Karang Taruna Banten, Tagana Banten dan PW GP Anshor Banten	Ketua dan Bendahara
Ade Rossi Chaerunnisa (menantu)	Himpaudi Banten, P2TP2A Banten, KONI Kota Serang dan PMI Kota Serang	Ketua
Hikmat Tomet (suami-alm)	Dekranasda	Ketua
Aden A. Kholik (adik ipar)	DPD KNPI Banten dan Perbasi Kota Serang	Ketua
Ratna Komalasari (ibu tiri)	PARFI Banten	Ketua
Tanto W. Arban (menantu)	HIPMI Banten dan GP Anshor Kota Tangerang Selatan	Ketua
Airin Rachmy Diany (adik ipar)	PMI Tangerang Selatan	Ketua

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu Tahun 2017

Berdasarkan pada Tabel 1.5 dapat dilihat dominasi keluarga Atut di dalam organisasi masyarakat di Banten, di mana hal ini bermula dari peran Chasan Sochib sebagai pemegang kendali yang kemudian memudahkan keluarga Atut dalam meraih dukungan masyarakat dengan jaringan yang dimilikinya. Dominasi keluarga Atut tidak hanya terjadi pada tingkat eksekutif, legislatif dan arena

kehidupan masyarakat, melainkan juga terjadi pada tubuh Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar diibaratkan sebagai kendaraan politik yang digunakan oleh keluarga Atut untuk menunjang kekuasaannya yang sebelumnya telah dilakukan oleh ayah Atut. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Dominasi Keluarga Atut di Partai Golkar Provinsi Banten

Nama dan Hubungan Keluarga	Jabatan
Ratu Tatu Chasanah (adik)	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPD I Partai Golkar Banten 2020-2025 • Pimpinan DPD I Partai Golkar Banten 2015-2020
Andika Hazrumy (anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar 2019-2024 • Bendahara Umum Partai Golkar 2016-2019
Ratu Ria Maryana (adik)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPD Partai Golkar Serang 2020-2025
Ade Rossi Chaerunnisa (menantu)	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Serang • Wakil Ketua DPD Partai Golkar Banten Bidang Seni dan Budaya 2016-2021 • Wakil Sekretaris Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Pusat 2015-2020
Tanto W. Arban (menantu)	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wiraswata, dan UMKM DPD I Partai Golkar Banten 2015-sekarang
Airin Rahmi Diany (ipar/istri dari Wawan)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar 2019-2024 • Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang Selatan 2014-2019

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada Tabel 1.6 dapat dilihat dominasi keluarga Atut di tubuh Partai Golkar Provinsi Banten. Kekuasaan Atut di Partai Golkar juga didukung dengan terpilihnya suami Atut, Hikmat Tomet sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Golkar Banten. Namun, pada tanggal 9 November 2013 Hikmat Tomet meninggal dunia karena penyakit stroke yang sudah lama dideritanya. Akan tetapi, dominasi tersebut kembali berlanjut dan semakin menguat

ketika adik Atut, Ratu Tatu Chasanah memenangkan pemilihan Ketua DPD I Partai Golkar Banten melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) menggantikan Hikmat Tomet yang telah meninggal dunia.³⁰

Kekuasaan tersebut juga semakin menunjukkan dominasinya ketika Ratu Tatu Chasanah terpilih kembali sebagai Ketua DPD I Golkar di Provinsi Banten melalui aklamasi.³¹ Selain itu, hasil riset menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah pengusung dinasti politik terbanyak dengan persentase 12,9 persen.³² Dilihat pada tubuh Partai Golkar, di mana masih menempatkan atau mendudukan keluarga Atut pada jabatan-jabatan publik merupakan tanda dari proses kaderisasi yang macet pada Golkar, sehingga Golkar hanya menaruh kepentingan atas kemenangan partainya semata. Hal ini kemudian menandakan bahwa partai politik bukanlah sebagai tempat yang tepat untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan keinginan rakyat, melainkan sebagai tempat dari awal kehancuran demokrasi.

Fenomena dinasti politik Atut di Banten jelas saja sudah membuat pengamat politik khawatir akan dampak yang akan terjadi kedepannya terhadap perpolitikan di Indonesia. Kekhawatiran tersebut disebabkan dari masifnya dominasi keluarga Atut dalam perpolitikan yang akan mencederai makna demokrasi itu sendiri, di mana tingginya angka dinasti politik di Indonesia hingga Tahun 2020 mencapai angka 14,78 persen atau 80 wilayah dari 541 wilayah di Indonesia.³³ Berdasarkan

³⁰ Golkar Banten. 2022. *Profil Pimpinan Golkar Banten*. <https://golkarbanten.or.id/profil-pimpinan/> (diakses pada tanggal 12 Juni 2022).

³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.

³² Kompas.com. 2020. *Perketat Aturan Maju Pilkada demi Cegah Dinasti Politik*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/08182691/perketat-aturan-maju-pilkada-demi-cegah-dinasti-politik?page=all> (diakses pada tanggal 13 Juni 2022).

³³ Taher dalam Mhd. Al Fahjri Sukri. 2020. *Loc. cit.*

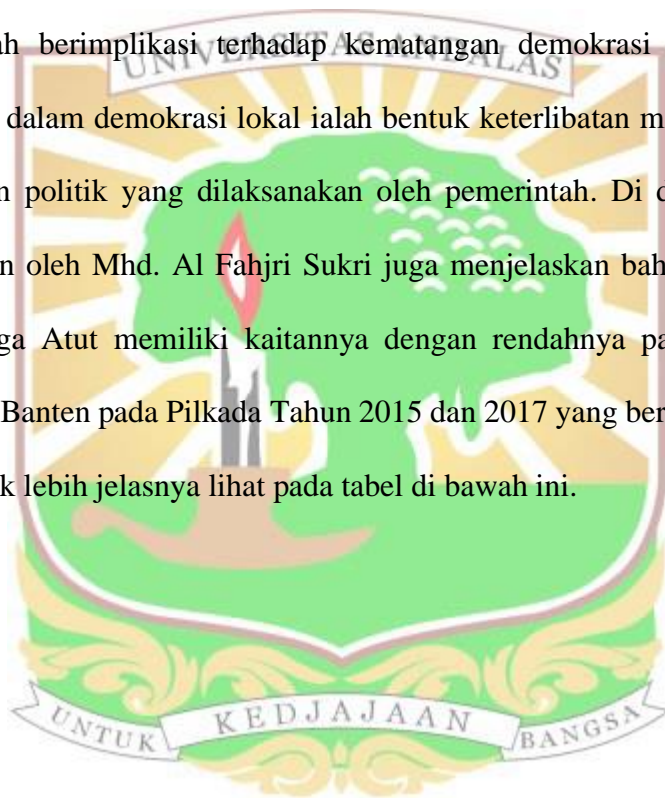
hasil riset tersebut, angka dinasti politik telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini kemudian telah mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia, yakni dengan menempatkan calon kandidat yang memiliki latar belakang hubungan kekerabatan dengan petahana maupun elit politik dan menghilangkan hak bagi calon kandidat lain yang memiliki kemampuan dan kecakapan.

Awal mula masifnya perkembangan dinasti politik di Indonesia dapat dilihat dari *history* pada masa Orde Baru, di mana tumbuh suburnya dinasti politik di Indonesia tidak terlepas dari keluarga cendana pada masa kepemimpinan Soerhato. Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia sehingga semua pos-pos kunci pemerintahan dapat dikuasai oleh anak, menantu, kemenakan, maupun kerabatnya. Selain itu, Kekuasaan yang dimiliki oleh Soeharto juga dipengaruhi oleh Partai Golkar yang pada masa itu merupakan partai dengan pemilih terbanyak. Kemenangan Golkar bukan tanpa alasan, sebab Soeharto bertindak otoriter dengan memaksa rakyat agar memilih Golkar pada saat Pemilu dilaksanakan. Hal ini kemudian menandakan bahwa pada masa itu demokrasi telah gagal berjalan meskipun terdapat Pemilu yang diselenggarakan.

Setelah masa keotoriteran Soeharto runtuh, dan berganti dengan hadirnya asas desentralisasi, yang di mana menjadikan kepala daerah memiliki hak dan wewenang yang utuh untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun telah hadirnya desentralisasi, tidak menutup kemungkinan dinasti politik akan hilang, melainkan, dinasti politik tetap tumbuh subur di daerah-daerah dengan hadirnya *local strongman* ataupun

raja-raja kecil yang berkuasa di daerah tersebut. Dinasti politik Atut merupakan salah satu contoh dari sekian banyak daerah yang memiliki dinasti politik yang hampir sama dengan masa Soeharto, sehingga dinasti politik ini disebut juga sebagai cendanasiasi di tingkat lokal atas keberhasilan membangun dinasti politik, meskipun sang aktor utama telah menjadi tersangka korupsi.

Oleh karena itu, tumbuh suburnya dinasti politik Atut di Banten dapat dikatakan telah berimplikasi terhadap kematangan demokrasi lokal, di mana fondasi utama dalam demokrasi lokal ialah bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Al Fahjri Sukri juga menjelaskan bahwa bertahannya dinasti keluarga Atut memiliki kaitannya dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten pada Pilkada Tahun 2015 dan 2017 yang berada di bawah 65 persen.³⁴ Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini.



³⁴ Mhd. Al Fahjri Sukri. *Loc. cit.*

Tabel 1.7 Partisipasi Masyarakat Banten pada Pilkada yang Diikuti oleh Keluarga Atut

Pilkada	Prov/Kab/Kota	Pemenang	Partisipasi	Menang/ Kalah
2015	Kabupaten Serang	Ratu Tatu Chasanah – Pandji Tirtayasa	50,80 %	Menang
	Kabupaten Pandeglang	Irna Narulita - Tanto W Arban	56,83%	Menang
	Kota Tangerang Selatan	Airin Rachmidiany - Benyamin Davnie	57,98%	Menang
2017	Provinsi Banten	Wahidin Halim - Andika Hazrumy	63 %	Menang
2018	Kota Serang	Vera Nurlaela Jaman - Nurhasan dikalahkan Syafrudin - Subadri	69,62 %	Kalah
2020	Kabupaten Serang	Ratu Tatu Chasanah - Pandji Tirtayasa	64 %	Menang
	Kota Tangerang Selatan	Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan	60,28 %	Menang

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan pada Tabel 1.7 dapat dilihat kemenangan keluarga Atut dalam setiap perhelatan Pilkada dengan minimnya partisipasi masyarakat yang selalu di bawah 65%. Di sisi lain, pada kekalahan Vela Nurlaela Jaman yang merupakan adik ipar Atut mencapai partisipasi masyarakat di atas 65 persen dengan angka yang diraih 69%. Hal ini membuktikan bahwa berkembangnya dinasti politik Atut dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat, sehingga Atut dan keluarganya dapat dengan mudah meluaskan garis kekuasaannya.

Partisipasi masyarakat di Banten yang minim juga disebabkan oleh peran lembaga ataupun instansi yang kurang efektif dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari KPU yang telah gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di Banten

selalu di bawah 65%. Selain itu, Partai Golkar yang lebih mengedepankan elektabilitas partainya dibandingkan dengan mencalonkan kandidat baru yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan dinasti politik Atut, dan pemerintah lokal yang tidak menjalankan perannya untuk tujuan yang ingin dicapai, di mana mengakibatkan masyarakat tidak memiliki hubungan yang baik antar warga dan jiwa semangat sosial yang tinggi, sehingga hal ini berdampak pada masyarakat dengan kurang terlibat dalam setiap kegiatan politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat di Banten yang disebabkan oleh rendahnya peran dari lembaga ataupun instansi telah membantu Atut dalam melanggengkan kekuasaannya, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap kematangan demokrasi lokal di Banten.

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan, pendapat mengenai demokrasi lokal juga disampaikan oleh Tip O'Neill, menurutnya *all politics is local*, yang dimaknai sebagai demokrasi nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi lokal berakar lebih kuat terlebih dahulu.³⁵ Hal tersebut serupa seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta di dalam bukunya, *Demokrasi Kita*. Hatta mengatakan bahwa perwujudan demokrasi kita nampak pada dinamika kehidupan masyarakat desa di Indonesia, artinya bahwa fondasi demokrasi Indonesia sudah terbangun dalam praktek demokrasi ala desa sebagaimana yang dicita-citakan oleh Hatta.³⁶ Merujuk dari yang telah dijelaskan oleh Tip O'Neill dan Hatta, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi lokal

³⁵ Zaldy Rusnaedy. *Op. cit.* Hlm. 19.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 14.

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kekukuhan dan keberlangsungan hidup demokrasi nasional.

Konsep demokrasi lokal menurut Timothy D. Sisk memiliki empat hal yang harus diperhatikan,³⁷ pertama, partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, peran serta masyarakat merupakan fondasi utama untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Kedua, proses musyawarah, yang dimaknai bahwa demokrasi tidak hanya sebatas Pemilu ataupun Pilkada, melainkan juga sebagai wadah untuk mencari solusi yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, pendidikan politik, yang merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk masyarakat, di mana bertujuan agar masyarakat yang terdidik dapat menjadikan demokrasi lebih efektif dan mampu mengurai konflik vertikal masyarakat dengan elit. Lalu, keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah dengan menciptakan hubungan yang baik antar warga negaranya dan semangat sosial yang tinggi. Merujuk dari yang telah dijelaskan, demokrasi lokal dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat memiliki andil dalam setiap proses kegiatan politik. Hal ini berkaitan erat dengan Pilkada yang diselenggarakan sebagai proses pergantian kepemimpinan, dan juga peran KPU maupun partai politik yang sangat diperlukan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pada konsep demokrasi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa terwujudnya demokrasi tidak hanya disertai dengan adanya Pemilu maupun Pilkada, melainkan juga terdapat peran dari berbagai lembaga

³⁷ Timothy D. Sisk. *Op. cit.*, Hlm. 14-15.

ataupun instansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Hal ini juga sesuai seperti yang diungkapkan dalam konsep demokrasi lokal, yakni dengan menempatkan peran dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama untuk mewujudkan demokrasi. Selain itu, peran KPU dan partai politik yang juga sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat agar demokrasi yang ditujukan untuk masyarakat dapat berjalan secara efektif.

Dari yang telah dijelaskan mengenai perkembangan dinasti politik Atut di Banten dan masifnya dominasi dinasti politik Atut di tingkat legislatif, eksekutif, organisasi masyarakat, dan partai politik maka asumsi penelitian ini adalah dengan masih tumbuh subur dinasti politik Atut di Banten setelah sang aktor menjadi tersangka kasus korupsi dapat dijelaskan bahwa hal ini telah berimplikasi terhadap kematangan demokrasi di Banten. Hal tersebut dapat dilihat dari teori demokrasi lokal menurut Timothy D. Sisk yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, partisipasi atau keterlibatan masyarakat di Banten yang berada di bawah 65%, sehingga hal ini menyebabkan tumbuh suburnya dinasti politik Atut yang kemudian berimplikasi terhadap kematangan demokrasi lokal. Kedua, musyawarah yang berdasarkan demokrasi pasti melibatkan dialog di dalam masyarakat, namun dari masifnya dominasi dinasti politik Atut dapat dikatakan proses demokrasi di dalam masyarakat tidak berjalan dengan tidak adanya dialog yang melibatkan masyarakat.

Ketiga, pendidikan politik dalam masyarakat di Banten dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masifnya dominasi dinasti politik Atut yang merupakan salah satu permasalahan di dalam dunia politik lokal, sehingga dengan masih hadirnya dinasti politik di Banten, maka dapat

dikatakan bahwa masyarakat belum memahami dan terbuka terhadap permasalahan yang ada. Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial belum tercapai dalam masyarakat di Banten. Fenomena tumbuh suburnya dinasti politik Atut menjadi pertanyaan yang besar bagi pemerintah lokal Banten untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, di mana hal ini tidak dapat berjalan dengan baik jika di dalamnya masih hadir fenomena dinasti politik yang hanya menguntungkan elit politik lokal, namun merugikan pihak lain, yakni masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka pertanyaan penelitian ini adalah

1. Mengapa dinasti politik Atut masih mendominasi dalam perpolitikan di Banten?
2. Apa implikasinya pada kematangan demokrasi lokal di Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dominasi dinasti politik Atut di Banten dan faktor yang menyebabkan bertahannya dinasti politik tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implikasi terhadap kematangan demokrasi lokal dari tumbuh suburnya dinasti politik Atut di Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Secara akademis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan kebaruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya

dalam pengembangan mengenai kematangan demokrasi lokal dan dinasti politik pada pemerintahan lokal, terutama di Provinsi Banten. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan lanjutan penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun pada objek yang berbeda.

2. Secara Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi para elit politik khususnya yang menduduki jabatan publik, di mana fenomena mengenai dinasti politik sudah seharusnya dicegah karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintah dan partai politik dapat bekerja sama untuk memperbaiki regulasi Pilkada dengan mencegah hadirnya calon dari dinasti politik yang dilatarbelakangi oleh alasan hubungan kekerabatan. Selain itu, partai politik juga harus lebih memperketat proses rekrutmen politik dalam menyeleksi calon kandidat agar menjauhkan dari hal yang bersifat konflik kepentingan.

